



SISA WAKTU EFEKTIF HANYA 2,5 BULAN

Rp 21 Miliar untuk Pembelian 8 Bidang Lahan

YOGYA (KR) - Melalui APBD Perubahan 2020 Pemkot Yogya mengalokasikan sekitar Rp 21 miliar untuk pembelian delapan bidang lahan. Mayoritas lahan yang dibeli Pemkot pun kelak dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk ruang terbuka hijau publik (RTHP).

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Kota Yogya Wahyu Handoyo, menjelaskan sisa waktu efektif untuk kegiatan pengadaan lahan tersebut hanya 2,5 bulan. "Kami sudah menghitung tahapannya dan bisa direalisasikan karena itu bagian dari skala prioritas," jelasnya, Kamis (24/9).

Dari delapan bidang lahan tersebut, lima bidang di antaranya untuk kepentingan RTHP. Masing-masing di wilayah Kelurahan Sorosutan, Ngampilan, Pakuncen, Prenggan, dan Sosromenduran. Kemudian dua bidang untuk fasilitas umum yakni Kelurahan Giwangan dan Suryatmajan. Sedangkan satu bidang lainnya untuk kepentingan normalisasi simpang di Jalan Tegalturi.

Kepala Bidang Pertanahan Dispetaru Kota Yogya Sarmin, menambahkan berkaca pada tahun 2018 lalu dalam tempo waktu yang hampir sama pihaknya bisa menyelesaikan pengadaan belasan bidang lahan. Oleh karena itu pihaknya optimis dengan sisa waktu yang ada, kegiatan tersebut juga dapat direalisasikan. "Kami sudah lakukan verifikasi data. Para pemilik lahan juga sudah kami undang untuk pencerminan awal. Selanjutnya nanti akan ada appraisal dan targetnya pertengahan Desember sudah terjadi pembayaran," tandasnya.

Kendati demikian, pihaknya juga sudah memiliki pengalaman gagalnya pengadaan lahan. Akan tetapi hal itu bukan disebabkan durasi waktu

kegiatan melainkan akibat ketidaksepakatan harga antara pemilik dengan hasil appraisal. Kondisi itu pun sudah diantisipasi dengan komitmen dari para pemilik lahan. Apalagi kegiatan pengadaan lahan berdasarkan usulan dari wilayah.

Terkait dengan fungsinya, hampir semua lahan yang kelak dibeli oleh Pemkot akan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Seperti halnya RTHP, meski status aset milik Pemkot namun pengelolaan dan penggunaannya menjadi hak masyarakat.

Begitu pula fasilitas umum di Kelurahan tujuannya untuk memberikan ruang yang representatif sehingga bisa menunjang kegiatan di wilayah. Sedangkan terkait normalisasi simpang di Tegalturi, tidak bisa dipisahkan dengan pengembangan Yogya bagian selatan. "Di sana sedang dibangun Taman Pintar 2. Nantinya tentu ada banyak kendaraan skala besar yang melintas sehingga butuh manuver yang lebih luas," jelas Sarmin. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005